



KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga pemerintah non kementerian menegaskan komitmennya untuk membangun kepercayaan publik, mewujudkan pemerintahan yang transparan, serta mendukung partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme;
- b. bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, publik menuntut adanya kepastian mengenai jenis informasi yang dapat diakses, dibatasi, maupun dikecualikan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan terhadap informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, PPID memiliki tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 754).
 8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG

DIKUASAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Informasi Publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan kategori informasi publik pada tiap-tiap unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- KETIGA : Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Oktober 2025

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME REPUBLIK INDONESIA,



BANGBANG SURONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKUASAI DI LINGKUNGAN
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2025

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
BIRO PERENCANAAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT								
BERKALA								
1.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024 (tanpa lampiran)	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Bogor, 2019	✓	✓		5 Tahun
2.	Daftar Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan	Subbagian Hukum dan TU Biroren	Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	Setiap Tahun	✓	✓	✓	Setiap saat (online) 2 tahun (hardfile)
3.	Laporan Kinerja BNPT	Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Program dan Anggaran	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Bogor, 2024	✓	✓		3 Tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
4.	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	Tim Kerja Kehumasan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2025	✓	✓		5 tahun
5.	Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	Tim Kerja Kehumasan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2025	✓	✓		5 tahun
6.	Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025	Tim Kerja Kehumasan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2025	✓	✓		1 tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
7.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024 (dengan lampiran)	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Bogor, 2019	✓	✓		5 Tahun
8.	DIPA BNPT TA 2025	Tim Kerja Perencanaan Program Anggaran	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Bogor, 2025	✓		✓	4 Tahun
9.	RKA KL BNPT TA 2025	Tim Kerja Perencanaan Program Anggaran	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas	Bogor, 2025	✓		✓	4 Tahun
10.	Tahapan perumusan peraturan yang dibentuk	Subbagian Hukum dan TU Biroren	Kepala Bagian Hukum, Humas dan TI	Bogor, 2025	✓	✓		2 Tahun
11.	Peraturan, Monografi, Artikel, dan Putusan dalam website JDIH	Subbagian Hukum dan TU Biroren	Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas	Bogor, 2025	✓	✓	✓	Setiap saat (online) 2 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
								(hardfile)
12.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan BNPT RI	Tim Kerja Kehumasan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2023			✓	5 tahun
13.	Daftar Informasi Publik	Tim Kerja Kehumasan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Teknologi Informasi	Bogor, 2025	✓	✓	✓	2 tahun
BIRO UMUM								
BERKALA								
1.	Informasi tentang penerimaan calon pegawai	Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, Sekretariat Utama	Kepala Biro Umum	Bogor, 2024			✓	2 tahun
2.	Informasi tentang hasil seleksi calon pegawai	Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, Sekretariat Utama	Kepala Biro Umum	Bogor, 2025			✓	2 tahun
3.	Laporan Keuangan <i>Audited</i> TA 2024	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Tahunan (setelah hasil audit diterima dari BPK) di Bogor Tahun 2025	✓	✓		10 tahun
4.	Laporan Realisasi Anggaran Per Semester	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Fungsional Keuangan, Biro Umum	Tahunan (setelah hasil audit diterima dari BPK) di Bogor Tahun 2025	✓	✓		6 bulan
5.	Informasi Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	UKPBJ BNPT	PPK & Pokja	Per paket kegiatan			✓	Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan
TERSEDIA SETIAP SAAT								
6.	Ringkasan Profil Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro	Kepala Biro Umum	Bogor, 2025	✓	✓		2 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
		Umum, Sekretariat Utama						
7.	Laporan Barang Pengguna Tahunan 2024 Audited	Biro Umum, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris Utama selaku pengguna barang	Setelah tindak lanjut temuan BPK	✓	✓		2 tahun setelah pemeriksaan
8.	Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Tahunan T.A. 2024	Biro Umum, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris Utama selaku pengguna barang	Setelah tindak lanjut temuan BPK	✓	✓		2 tahun setelah pemeriksaan
9.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan/Penunjukan Langsung)	UKPBJ BNPT	PPK	Per Kegiatan		✓	✓	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
10.	Daftar Penyedia LPSE BNPT	UKPBJ	Kepala UKPBJ	Periode 2025 BNPT			✓	
DIREKTORAT PENCEGAHAN								
BERKALA								
1.	Hasil Nasional Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2024	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2024	✓	✓		2 Tahun setelah diperbaharui
2.	Executive Summary Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2023	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2023	✓	✓		2 Tahun setelah diperbaharui
3.	Booklet Rakernas FKPT Ke-XII Tahun 2025: Konsep Kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Tahun Anggaran 2025	Direktorat Pencegahan	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Bogor, 2025	✓	✓		5 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan
4.	Jurnal Jalan Damai	Subdit Kontra Propaganda	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2025	✓	✓		3 tahun
5.	Policy Brief Peta Narasi dan Pola Propaganda 2024	Subdit Kontra Propaganda	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2025	✓	✓		3 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
TERSEDIA SETIAP SAAT								
6.	Dokumentasi kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Direktorat Pencegahan	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Bogor, 2022		✓	✓	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan
7.	Modul Pencegahan Terorisme di Indonesia	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Jakarta, 2018		✓	✓	2 Tahun setelah diperbaharui
8.	Peraturan Kepala BNPT Nomor Per-02/K.BNPT//2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah	Direktorat Pencegahan	Subdit Pemberdayaan Masyarakat	Bogor, 2012	✓	✓		2 Tahun setelah diperbaharui
9.	Hasil Indeks Risiko Terorisme (IRT) Tahun 2023 per Kabupaten/Kota	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2023	✓			2 Tahun setelah diperbaharui
10.	Hasil Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2024 per Provinsi	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2024	✓			2 Tahun setelah diperbaharui
11.	Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Direktorat Pencegahan	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2024	✓	✓		2 Tahun setelah diperbaharui
12.	Modul Sekolah Damai	Subdit Kontra Propaganda	Direktorat Pencegahan	Bogor, 2024	✓	✓		5 tahun
DIREKTORAT PERLINDUNGAN								
BERKALA								
1.	Informasi yang dipublikasikan dalam media sosial instagram @forsitasbnptri	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2025			✓	4 tahun
2.	Alur Pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2025	✓	✓	✓	Selama berlaku berdasarkan Putusan MK

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
	Perkara: 103/PUU- XXI/2023 bagi Warga Negara Indonesia Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu							Nomor 103/PUU- XXI/2023
3.	Materi Sosialisasi Layanan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2025	✓		✓	Selama berlaku berdasarkan Putusan MK Nomor 103/PUU- XXI/2023
4.	Informasi Objek yang sudah dilakukan Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 dan Asesmen Sistem Pengamanan	Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2025		✓		1 Tahun Berjalan
5.	Informasi Objek yang sudah dilakukan Audit Sistem Pengamanan Objek Vital yang Strategis Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2025		✓		1 Tahun Berjalan
6.	Daftar Objek yang Telah Memperoleh Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	Direktorat Perlindungan	Subdirektorat Pengamanan Lingkungan	Bogor, 2025	✓			1 Tahun Berjalan
TERSEDIA SETIAP SAAT								
7.	Surat Keputusan Direktur Perlindungan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Koordinasi Program Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2023	✓	✓		5 tahun
8.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021 tentang	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Jakarta, 2021	✓	✓	✓	5 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
	Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme							
9.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Indeks Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan	Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Jakarta, 2024	✓	✓	✓	5 tahun
10.	Maklumat Pelayanan Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT - Koordinasi Program Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2022	✓	✓		5 tahun
11.	Kumpulan SOP Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Bogor, 2022-2025		✓		Selama berlaku
12.	Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital Yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Direktorat Perlindungan	Direktorat Perlindungan	Bogor, 2024	✓	✓		Selama berlaku
DIREKTORAT DERADIKALISASI								
BERKALA								
1.	Kegiatan dan Program Subdirektorat Bina Masyarakat	Direktorat Deradikalisasi	Direktorat Deradikalisasi	Bogor, 2025	✓	✓	✓	Selama berlaku
2.	Kegiatan dan Program Subdirektorat Bina Dalam Lapas	Direktorat Deradikalisasi	Direktorat Deradikalisasi	Bogor, 2025	✓	✓	✓	Selama berlaku
TERSEDIA SETIAP SAAT								
3.	Struktur Organisasi Subdit Bina Lapas	Direktorat Deradikalisasi	Direktorat Deradikalisasi	Bogor, 2025	✓	✓	✓	Selama berlaku

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
	Khusus Teroris							
4.	Jumlah Sasaran Pembinaan Deradikalisasi (WBP Lapas Khusus Kelas IIB Sentul)	Direktorat Deradikalisasi	Direktorat Deradikalisasi	Bogor, 2025	✓	✓	✓	Selama berlaku
DIREKTORAT PENINDAKAN								
BERKALA								
1.	Laporan Kegiatan Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	Bogor, 2025	✓	✓		1 tahun
2.	Statistik Pemblokiran Akun atau Konten Terindikasi Intoleran, Radikal, dan Terorisme	Subdit Teknologi Intelijen	Subdit Teknologi Intelijen	Bogor, 2025	✓	✓		1 Tahun
SERTA MERTA								
3.	Kejadian teror (jika terjadi)	Direktorat Penindakan	Direktorat Penindakan	Bogor, waktu tidak menentu	✓		✓	Saat kejadian
TERSDEIA SETIAP SAAT								
4.	SKEP Pembentukan Tim Penggerak Desa Siapsiaga BNPT T.A 2025	Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	Bogor, 2025	✓	✓		Selama berlaku
5.	Jumlah Penangkapan Terduga Terorisme (Rekapitulasi Jumlah dan daerah penangkapan)	Direktorat Penindakan	Direktorat Penindakan	Bogor, 2025			✓	2 tahun
6.	Jumlah FTF (rekapitulasi Jumlah)	Direktorat Penindakan	Direktorat Penindakan	Bogor, 2025			✓	2 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
7.	Perkembangan Jaringan Terorisme Dalam dan Luar Negeri	Direktorat Penindakan	Direktorat Penindakan	Bogor, 2025			✓	2 tahun
DIREKTORAT PEMBINAAN KEMAMPUAN								
BERKALA								
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembinaan Kemampuan T.A. 2024	Direktorat Pembinaan Kemampuan	Direktorat Pembinaan Kemampuan	Bogor, 2024	✓	✓		3 Tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
2.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-07/K.BNPT/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme Yang Menggunakan KBRN	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2013	✓	✓	✓	Selama belum terbit peraturan yang baru
3.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2020	✓	✓	✓	Selama belum terbit peraturan yang baru
4.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2021	✓	✓	✓	Selama belum terbit peraturan yang baru

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
5.	Buku Saku Pedoman Praktis Deteksi dan Cegah Dini Potensi Terorisme di Kelurahan/Desa Tahun 2022	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2022	✓	✓		5 Tahun
6.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2022	✓	✓		Selama belum terbit peraturan yang baru
7.	Modul Pelatihan Penyusunan dan Distribusi Narasi Moderat serta Pelaporan Konten Radikal bagi Aparatur Pemerintah Tahun 2023	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2023	✓	✓		5 Tahun
8.	Modul Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme KBRNE Tahun 2023	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Bogor, 2023	✓	✓		5 Tahun
9.	Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme di Kelurahan / Desa Tahun 2023	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Direktorat Pembinaan Kemampuan	Bogor, 2023	✓	✓		5 Tahun
10.	Pedoman Pelatihan Aparat Tiga Pilar dalam Melakukan Pencegahan Radikal Terorisme	Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Operasi	Direktorat Pembinaan Kemampuan	Bogor, 2024	✓	✓		5 Tahun
DIREKTORAT PENEGAKKAN HUKUM								

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
BERKALA								
1.	Daftar Rencana Kerja Subdit Perlindungan Aparat Penegakan Hukum	Subdit Perlindungan Aparat Penegakan Hukum	Subdit Perlindungan Aparat Penegakan Hukum	Bogor, 2025	✓			1 Tahun
2.	Daftar Kegiatan yang Telah dilaksanakan oleh Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	Bogor, 2025	✓			1 Tahun
3.	Daftar Kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Analisa dan Evaluasi Penegakan Hukum	Kelompok Jabatan Fungsional Analisa dan Evaluasi Penegakan Hukum	Kelompok Jabatan Fungsional Analisa dan Evaluasi Penegakan Hukum	Bogor, 2025	✓			1 Tahun
DIREKTORAT REGIONAL DAN MULTILATERAL								
BERKALA								
1.	Ringkasan Informasi tentang Program dan Kegiatan Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral a. Struktur organisasi b. Nama program dan kegiatan c. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi d. Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan masyarakat	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2025			✓	2 tahun
2.	Ringkasan Informasi tentang kinerja Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral a. Laporan kinerja pemerintahan	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2025			✓	5 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
	<ul style="list-style-type: none"> b. Laporan publik implementasi RAN PE selama periode tahun 2024 c. Ringkasan Eksekutif Hasil Evaluasi RAN PE 2020-2024 d. Panduan Penyusunan Kebijakan RAN PE di Daerah e. Laporan aktivitas I-Khub selama periode tahun 2024-2025 							
3.	Ringkasan laporan akses informasi publik <ul style="list-style-type: none"> a. Data statistik total jumlah aktivitas, penerima manfaat dan pengunjung platform I- Khub selama periode tahun 2024-2025 	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2025			✓	5 tahun
SERTA MERTA								
4.	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2025			✓	2 tahun
TERSEDIA SETIAP SAAT								
5.	Daftar produk pengetahuan BNPT yang tersedia di platform I-KHub <ul style="list-style-type: none"> a. Policy Analysis Vol. 1 No. 1 tentang akselerasi implementasi RAN PE di tingkat daerah b. Policy Analysis Vol. 1 No. 2 tentang tantangan penanggulangan penyalahgunaan lembaga amal untuk pendanaan terorisme c. Urgensi pendekatan pentahelix dalam penanggulangan 	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2024			✓	5 tahun

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
	<p>ekstremisme dan terorisme di Indonesia</p> <p>d. Kolaborasi dan aksi kolektif masyarakat sipil bersama Pemerintah dalam upaya PE</p> <p>e. Urgensi data geospasial dalam pengambilan kebijakan dan intervensi pencegahan terorisme</p> <p>f. Strategi Collaborative Governance dalam memperkuat penyediaan data ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme: praktik baik kerja sama CDS – BNPT</p> <p>g. Peran dan Motivasi Perempuan dalam Aksi Terorisme Bunuh Diri: Perspektif Rasionalitas dan Emosi (Rational-Emotional Choice) Regional dan Multilateral</p> <p>h. Komitmen dan Rekomendasi Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pencegahan Intoleransi</p> <p>i. I-KHub BNPT Advance Analysis</p> <p>j. I-KHub BNPT CT/VE Outlook 2023</p> <p>k. Policy Brief Pencegahan Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme melalui Koordinasi dan Kolaborasi antara BNPT dengan Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Policy Analysis Vol. 2 No. 1 tahun 2023 tentang</p>							

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softfile	Hardfile	Online	
	Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Kalangan Aparatur Negara l. I-KHub BNPT CT/VE Outlook 2024 m. Peta Narasi dan Pola n. Propaganda Radikal Terorisme di Media Sosial							
6.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam kegiatan yang bersifat tidak rahasia dan terbuka untuk umum	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2025			✓	2 tahun
7.	Informasi lainnya di lingkungan BNPT berdasarkan persetujuan pimpinan PPID	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral	Jakarta, 2025			✓	2 tahun
DIREKTORAT PERANGKAT HUKUM INTERNASIONAL								
BERKALA								
1.	Ringkasan Informasi tentang Program dan Kegiatan Direktorat Perangkat Hukum Internasional a. nama program dan kegiatan b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi c. target atau capaian program dan kegiatan d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Jakarta, 2024		✓	✓	2 tahun

TERSEDIA SETIAP SAAT								
2.	Asesmen terhadap 10 Konvensi dan Protokol Internasional tentang Penanggulangan Terorisme	Sub Direktorat Konvensi dan Resolusi Internasional	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Jakarta, 2019		✓	✓	5 tahun
3.	Buku Saku Pencegahan Terorisme	Sub Direktorat Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	Direktorat Perangkat Hukum Internasional	Jakarta, 2024		✓	✓	5 tahun

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME REPUBLIK INDONESIA,



BANGBANG SURONO